

MENGUKUR AKUNTABILITAS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Sopian¹, Asqolani², Bagas Johantri³

¹ Prodi DIV Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN
Sopian@pknstan.ac.id

² Prodi D III Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN
Asqolani@pknstan.ac.id

³ Prodi D III Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN
Bagasjohantri@pknstan.ac.id

ABSTRACT

The implementation of basic education is the government's responsibility to educate nation's life. This responsibility is conducted in form of providing education fund through school operational assistance (BOS) to all elementary school and junior high school. To prevent the mismanagement of BOS funds, transparency and accountability are mandatory. The research purpose is to examine the effect of competence, school management function and information technology on the accountability of BOS fund management with stewardship theory, stakeholder's theory, and the legitimate theory as the basis of assessment. A quantitative method with Partial Least Squares Structural Equation Modelling as the analysis tools to measure the hypothesis. This research concludes that the competence, the management school, and the information technology, either partially or simultaneously significantly affected the accountability of BOS fund. The result of this research can be used by the South Tangerang City Education Agency to strengthen the competence of school treasurer, to increase the participation of management school and the society, and to enhance the information technology to support the transparency and the accountability of BOS management fund.

Keywords: Accountability, BOS Fund, Competency, Information Technology, School Management

ABSTRAK

Penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan kewajiban pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk penyediaan dana pendidikan melalui bantuan operasional sekolah (BOS) kepada semua sekolah tingkat SD dan SMP. Untuk mencegah penyalahgunaan dana BOS diperlukan keterbukaan dan akuntabilitas. Riset ini bertujuan menguji pengaruh kompetensi, fungsi manajemen sekolah dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Pengujian pengaruh didasari oleh teori *stewardship*, teori *stakeholders* dan teori legitimasi. Riset ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat bantu analisis *Partial Least Squares Structural Equation Modelling* (PLS SEM). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kompetensi, fungsi manajemen sekolah dan teknologi informasi baik secara partial maupun secara simultan mempengaruhi secara signifikan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Hasil riset ini dapat dipergunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk memperkuat kompetensi bendahara sekolah, meningkatkan partisipasi manajemen sekolah dan masyarakat serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci: Akuntabilitas, Dana BOS, Kompetensi, Manajemen Sekolah, Teknologi Informasi

1. PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, hak untuk mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara dalam rangka mengembangkan potensi diri dijamin oleh konstitusi. Pemerintah mengusahakan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang dapat mewujudkan kecerdasan kehidupan berbangsa. Gerakan reformasi telah melahirkan sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan lebih luas dalam bentuk otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengurus diri dan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. Awal pelaksanaan otonomi daerah melahirkan sisi negatif bagi sektor pendidikan di Indonesia. Kebijakan pemerintah daerah yang belum berpihak pada pembangunan manusia mengakibatkan proses pendidikan mengalami kemunduran seperti proses belajar mengajar seadanya, fasilitas pendidikan yang minim, tenaga guru dan tenaga pendidik yang kurang bermutu dan dana operasional sekolah yang kurang tersedia (Suhardi, 2020). Akibat langsung yang diderita oleh masyarakat adalah banyaknya dana yang dipungut untuk kebutuhan operasional pendidikan.

Fluktuasi harga minyak dunia berdampak pada kondisi fiskal pemerintah. Pada tahun 2005, pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar bersubsidi lebih dari 100% akibat dari melonjaknya harga minyak di pasar internasional (Saleh, 2005). Program Bantuan Operasional Sekolah (untuk selanjutnya disingkat BOS) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi dampak buruk kepada masyarakat akibat kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak pada tahun 2005 (Kharisma, 2013). Dengan kebijakan realokasi belanja untuk program BOS diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi belajar pada anak usia wajib belajar. Kebijakan BOS secara nyata telah memberi dampak pada peringanan biaya pendidikan, peningkatan mutu program Pendidikan dan fasilitas sarana dan prasarana sekolah (Wirawan, 2014).

Anggaran Pendidikan untuk kebutuhan BOS selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun tidak besar. Mengutip data dari databoks.katadata.co.id, secara rata-

rata selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2021 anggaran belanja BOS meningkat sebanyak 4,3% per tahun.

Orientasi dunia Pendidikan telah mengalami pergeseran dari produk kepada kebutuhan pasar (Arismunandar et al., 2013). Pergeseran orientasi tersebut disebabkan oleh faktor desentralisasi, peningkatan partisipasi pemangku kepentingan pendidikan dan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan. Sistem desentralisasi pendidikan telah mengurangi peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan dan memberikan kesempatan lebih besar kepada pimpinan daerah untuk mengelola pendidikan. Orang tua, guru dan masyarakat membutuhkan informasi tentang pengelolaan pendidikan yang telah dilakukan oleh pihak sekolah.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki misi untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui program kerja peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah (Dinas Pendidikan, 2021). Untuk mendukung implementasi program kerja, telah disusun prosedur pengajuan dan pencairan dana operasional sekolah yang bertumpu pada data jumlah siswa didik yang terdaftar pada sistem informasi data pokok peserta didik.

Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung serta penggunaan teknologi informasi merupakan prasyarat bagi peningkatan kualitas pendidikan bagi peserta didik dengan tetap mempertahankan nilai keagamaan, nilai sosial dan budaya, serta norma dan aturan hukum yang berlaku (Dinas Pendidikan, 2021). Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah sebaran sekolah yang belum merata, kualitas tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi, daya tampung sekolah terbatas dan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kompetensi kepala sekolah dan guru sebagai tenaga pendidik pada tingkat pendidikan dasar merupakan tantangan yang masih perlu mendapat perhatian. Kepala sekolah memegang peranan krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui implementasi kemampuan manajerial sekolah dalam bentuk pengarahan penyusunan

rencana kegiatan dan anggaran, pengorganisasian kegiatan, pengawasan dan kemampuan dalam melakukan kerja sama dengan instansi lain untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik (Hidayat & Noviarti, 2019).

Bendahara sekolah memiliki peran yang penting dalam membantu kepala sekolah untuk mengelola keuangan sekolah baik yang berasal dari bantuan pemerintah maupun yang berasal dari sumber lainnya. Kemampuan bendahara sekolah terkait teknis perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana sekolah masih perlu ditingkatkan (Soemari et al., 2020). Untuk memperkuat implementasi manajemen sekolah, maka pengawas sekolah juga perlu meningkatkan kemampuan melakukan pemeriksaan khususnya yang berkaitan dengan pengawasan penggunaan dana BOS (K. P. Rahayu et al., 2020).

Teknologi informasi dapat membantu memantau penyebaran penerima BOS yang dapat dipergunakan sebagai media pemetaan dan monitoring (Samdiar et al., 2010). Dengan pemetaan dan pemantauan dana bantuan operasional yang telah diterima oleh sekolah, diharapkan dapat membantu upaya pemerataan akses pendidikan kepada masyarakat yang masih sulit memperoleh kesempatan untuk mendapat pendidikan yang berkualitas.

Pada tataran peraturan, setiap program dan kegiatan pemerintah yang didukung dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah harus dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 3 undang-undang nomor 28 tahun 1999 menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai asas pemerintahan yang baik mewajibkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan negara dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban setiap kegiatan penyelenggaraan negara sebagai implementasi asas akuntabilitas ditujukan agar dapat dinilai kinerjanya dan diketahui oleh masyarakat.

Pada tataran operasional, pengelolaan dana BOS secara umum terdapat kendala ketidakcukupan anggaran dan keterlambatan penyaluran dana kepada sekolah (Sulfiati et al., 2019); (Regina et al., 2014a). Kelengkapan berkas sebagai bagian tak

terpisahkan dalam proses pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sekolah dan ketidakmampuan sekolah untuk menentukan skala prioritas dalam perencanaan dan penggunaan dana bantuan operasional juga mempengaruhi efektivitas penggunaan dana operasional sekolah (Hakim & Suhendar, 2020).

Implementasi penggunaan dana BOS di lapangan masih ditemukan berbagai dugaan penyimpangan. Intimidasi dan korupsi yang terjadi terhadap penggunaan dana BOS menjadi perhatian Menteri Pendidikan. Kepala sekolah mengalami kendala dalam proses administrasi pembelanjaan dana BOS. Di sisi lain, kasus korupsi yang terjadi dalam penggunaan dana BOS dapat dihindari jika optimalisasi penggunaan teknologi informasi maupun aplikasi platform digital dapat dilakukan. Rahmadhani & Suparno, (2020) dan Ariastiani et al., (2018) berkeyakinan bahwa pengendalian internal dan partisipasi aktif komite sekolah dapat mencegah kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS.

Penyalahgunaan dana BOS oleh oknum tenaga pendidik dapat terjadi karena lemahnya pengawasan. Pontoh et al., (2017) menemukan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS masih kurang optimal. Inspektorat selaku pengawas internal maupun Badan Pemeriksa Keuangan selaku pemeriksa eksternal belum melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana BOS. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pengelolaan dana BOS baru pada tahap perolehan keyakinan bahwa sekolah telah menerima dana BOS secara penuh dari pemerintah pusat.

Riset sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa akademisi banyak mengupas tentang akuntabilitas pengelolaan dana BOS dengan pendekatan studi kasus pada sekolah tertentu. Julantika et al., (2017) meneliti tentang akuntabilitas dana BOS dan pertanggungjawaban pada SDN Pringgowirawan 02 Jember, Yanti, (2021) mendalami penerapan akuntabilitas dan transparansi dana BOS pada SMP 3 Sukawati Gianyar, Wirawan, (2014) meneliti kebijakan dana BOS untuk meningkatkan mutu sekolah pada SD Negeri Percontohan 1 di kota Malang, Andi et al., (2015) membahas efektivitas dana BOS untuk madrasah ibtidaiah swasta di Pidie, Souliisa, (2017) melakukan evaluasi kebijakan dana BOS di SDN 24 Palu dan SDN 15 Palu, Untuk tingkat SMK,

Hakim & Suhendar, (2020) melakukan evaluasi pelaksanaan dana BOS pada SMK Negeri 3 dan SMK Assalam Jayanti di Provinsi Banten. Sementara Sulfiati et al., (2019) melakukan studi pustaka terkait peraturan dan pedoman implementasi pengelolaan dana BOS di Kabupaten Binjai Regina et al., (2014) memotret implementasi kebijakan dana BOS dari sudut pandang Dinas Pendidikan Kota Malang sebagai pengelola anggaran dan A. Rahayu & Setianingsih, (2005) meneliti tentang pengawasan dana BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. Penelitian yang dilakukan para akademisi tersebut berfokus pada implementasi pengelolaan dana BOS pada tataran operasional dengan menjadikan satu sekolah sebagai sebuah studi kasus. Kami melihat bahwa pengukuran akuntabilitas pengelolaan dana BOS dengan metode survei dimana parameter kompetensi, manajemen sekolah dan teknologi informasi belum dilakukan. Materi pertanyaan yang diajukan sebagai bahan survei beranjak dari hasil penelitian model kualitatif yang telah dilakukan oleh beberapa akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat memotret implementasi akuntabilitas pengelolaan dana BOS secara umum pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kota Tangerang Selatan. Variabel kompetensi akan difokuskan pada pengukuran latar belakang pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh pimpinan sekolah, bendahara dan guru perwakilan dalam pengelolaan dana BOS. Manajemen sekolah akan diukur dengan variabel implementasi fungsi tim manajemen sekolah dalam pengelolaan dana bantuan mulai dari partisipasi para pihak dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pertanggungjawaban dan proses pelaporan dana BOS. Variabel teknologi informasi akan diukur dengan parameter ketersediaan dan penggunaan teknologi informasi dalam proses perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana BOS. Akuntabilitas dana BOS akan diukur dengan parameter kepatuhan pelaporan, ketersediaan informasi laporan, penyampaian laporan kepada para pihak yang berkepentingan, dan ketersediaan akses untuk para pihak yang berkepentingan terhadap informasi dana BOS baik selama proses perencanaan dan pelaporan penggunaan dana BOS.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi manajemen sekolah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS
2. Apakah fungsi manajemen sekolah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS
3. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS
4. Apakah kompetensi, fungsi manajemen sekolah dan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perbendaharaan literatur tentang akuntabilitas pengelolaan dana publik khususnya BOS dengan parameter pengujian manajemen sekolah, kompetensi sumber daya dan teknologi informasi. Penambahan perbendaharaan literatur bertujuan untuk memperkuat dunia penelitian pengelolaan dana publik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Penelitian tentang pengaruh kompetensi, manajemen sekolah dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana BOS diharapkan dapat memberikan masukan terkait dengan perbaikan pengelolaan dana BOS. Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana BOS dapat ditingkatkan dan yang masih kurang memiliki pengaruh dapat diperbaiki.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori Stewardship

Sistem *stewardship* (kepengurusan) telah ada sejak jaman abad pertengahan dimana seorang pelayan akan menjaga properti, binatang ternak, perkebunan dan melayani kebutuhan para kaum bangsawan (Donleavy, 2016). Kaum bangsawan adalah pemilik dan pelayan adalah agen. Namun karena masih menganut sistem feodalisme maka belum ada kesadaran tentang kebutuhan biaya agen (*agency cost*). Ketika perdagangan dunia semakin terbuka dan ditinggalkannya sistem feodalisme serta menjamurnya entitas bisnis, maka peran steward berfokus pada mengamankan aset dan uang milik prinsipal. Secara kritis, steward

yang baik terjadi ketika steward mampu mengamankan aset dan uang prinsipal dari pencurian, penggelapan, kekurangan dan perilaku mismanajemen. Teori stewardship menekankan pada situasi dimana pimpinan atau manajer tidak dipengaruhi oleh kepentingan individu tetapi menyelaraskan dengan tujuan organisasi (Davis et al., 1997). Teori stewardship menekankan pada perilaku kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* (Pasoloran & Rahman, 2001). Ketika kepentingan *principal* dan *steward* mengalami perbedaan maka *steward* akan berusaha untuk bekerja sama daripada menentang. Pertimbangan utama *steward* untuk melakukan kerja sama dengan *principal* adalah bahwa keputusan untuk menyesuaikan dengan kepentingan atau perilaku *principal* adalah karena bersifat rasional dengan pertimbangan untuk pencapaian tujuan organisasi atau entitas. Teori *stewardship* mengembangkan konsep kebersamaan (*collectivity*), kemitraan (*partnership*), pemberdayaan (*empowerment*), saling percaya (*trust*) dan pelayanan. Penerapan teori *stewardship* untuk menganalisis pengelolaan dana BOS telah dilakukan oleh beberapa peneliti (Pontoh et al., 2017) (Kasmini et al., 2017). Para peneliti meyakini bahwa manajemen sekolah tidak mengutamakan kepentingan individu mereka tetapi mengutamakan sasaran organisasi yang telah disepakati bersama. Penerapan teori *stewardship* dapat mendukung kinerja bendahara sekolah yang berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Di sisi lain, penganggaran yang berkualitas dengan ditopang oleh sumber daya manusia yang mumpuni disimpulkan dapat meningkatkan kualitas kinerja keuangan sekolah secara signifikan (FAUZAN, 2020).

Teori Legitimasi

Kesediaan entitas untuk melaporkan secara sukarela informasi yang tidak diminta oleh ketentuan hukum ditelaah dalam teori legitimasi (Donleavy, 2016). Kesediaan perusahaan melaporkan informasi tanpa diwajibkan oleh ketentuan dimaksudkan untuk memperoleh legitimasi baik dari para investor, konsumen, ataupun masyarakat secara umum. Kesediaan perusahaan untuk

melaporkan informasi kepada masyarakat walaupun tidak diharuskan oleh ketentuan disebut kontrak sosial. Makna kontrak sosial dalam teori legitimasi adalah bahwa masyarakat adalah entitas sesungguhnya dan kepentingan masyarakat adalah nyata dan merupakan kepentingan publik. Teori legitimasi menganalogikan bahwa entitas adalah seperti manusia sebagai makhluk hidup yang dapat berperilaku baik.

Pengungkapan informasi (*disclosures*) dapat dioptimalkan oleh manajemen untuk mendemonstrasikan kepada masyarakat bahwa entitas memiliki perhatian terhadap masalah sosial masyarakat (Rokhlinasari, 2016). Dengan pengungkapan informasi secara sukarela, manajemen telah menunjukkan kegiatan perusahaan yang tidak bertentangan dengan nilai sosial yang ada di masyarakat.

Teori Stakeholders

Stakeholders Theory dikembangkan oleh Edward Freeman pada tahun 1984 dalam pengembangan keilmuan manajemen strategis. *Stakeholder* adalah setiap orang atau sekelompok orang yang mampu mempengaruhi entitas atau entitas yang terpengaruh (Freeman & McVea, 2005). Teori stakeholder merupakan pendekatan terintegrasi antara positif normatif dan teori instrumental (Donleavy, 2016). Aspek hormati menekankan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan maka setiap kepentingan dari para *stakeholders* harus dipertimbangkan. Aspek positif adalah bahwa kesejahteraan atau kepentingan pemilik entitas akan semakin meningkat ketika kepentingan semua pihak (*stakeholders*) telah dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan. Aspek instrumental menekankan bahwa pihak yang paling berpengaruh akan menentukan keputusan yang akan diambil entitas. Pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh sedikit kepada entitas tidak akan berhasil untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan entitas.

Teori stakeholder memberikan pengaruh yang positif terhadap pengelolaan dana BOS (Susanti, 2019a). Keputusan, kebijakan ataupun penyusunan rencana kerja, pengawasan dan pelaporan akan lebih efektif

pada saat warga sekolah seperti siswa, guru dan kepala sekolah dan masyarakat terlibat aktif baik secara individu maupun kolektif. Dengan keterlibatan warga sekolah secara aktif diharapkan bahwa pengambilan keputusan atau kebijakan telah mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Hasil penelitian yang dilakukan Rakhmawati, (2018) menunjukkan hasil yang berbeda pada saat tingkat partisipasi pemangku kepentingan meningkat. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi berarti semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS yang berdampak pada ketidakefektifan program kerja sekolah.

Manajemen BOS Sekolah

Manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma manajemen pendidikan yang memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah untuk mengelola sekolah sesuai dengan kebutuhan dan mendorong pengambilan keputusan secara partisipatif dengan melibatkan semua warga sekolah secara langsung untuk meningkatkan mutu atau prestasi (Firdianti, 2018). Dengan otonomi sekolah yang lebih luas maka pengelolaan sekolah yang mencakup keuangan, sarana prasarana, metode dan proses pembelajaran dan berbagai komponen yang menunjang kelancaran pendidikan di sekolah direncanakan dan dilaksanakan secara musyawarah bersama antara pimpinan sekolah, guru dan masyarakat (Widyastuti et al., 2020).

Model manajemen berbasis sekolah yang diadopsi di Indonesia adalah model manajemen yang memberikan otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah, mendorong partisipasi langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan ketentuan yang berlaku (Ismail, 2018). Semua kegiatan dan program kerja sekolah dalam manajemen berbasis sekolah telah disetujui dan ditetapkan oleh komite sekolah berdasarkan musyawarah dari para anggota yang terdiri pejabat pendidikan daerah, kepala sekolah, para guru, perwakilan orang tua, dan tokoh masyarakat (Pratiwi, 2016). Kepala sekolah berperan

menjadi leader, *Inovator* dan evaluator dan juga sebagai pembina kepada para guru, staf pendidik dan siswa. Para Guru bertanggungjawab untuk pada pembentukan moral maupun intelektual melalui penanaman nilai-nilai kepada siswa. Orang tua siswa berperan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan program kerja sekolah melalui pertemuan dan diskusi antara pihak sekolah dengan orang tua. Di sisi lain, orang tua juga berperan membantu meningkatkan keberhasilan pendidikan melalui pendampingan belajar siswa saat di rumah.

Kompetensi Tim BOS Sekolah

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan dan faktor internal lainnya yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya (Busro, 2018). Menurut Bauder dalam (Busro, 2018) menguraikan bahwa unsur kompetensi meliputi tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan keterampilan kerja yang dimiliki. Kompetensi dibangun melalui proses perolehan pengetahuan dengan cara pembelajaran dan bermuara pada penggunaan pengetahuan untuk menyelesaikan pekerjaan (Parulian & Thoha, 2008). Kompetensi teknis berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki suatu jenjang jabatan tertentu dan kompetensi perilaku berkaitan dengan perilaku yang harus diperagakan atau didemonstrasikan oleh pemangku jabatan selama melaksanakan pekerjaan.

Kompetensi bagi bendahara pengeluaran adalah mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya khususnya penggunaan uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Bandiyono & Andri, 2012a). Kompetensi bendahara sekolah diharapkan mampu menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja sekolah yang dana bersumber dari APBN.

Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan teknologi yang dipergunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan,

menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai bentuk untuk menghasilkan informasi berkualitas yang meliputi akurat, tepat waktu, relevan baik untuk kepentingan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi strategis untuk pengambilan keputusan (Simarmata et al., 2020). Teknologi informasi diciptakan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pekerjaan, membantu memecahkan masalah, membuka kreativitas dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan (Karim et al., 2020).

Di sektor pemerintah, teknologi informasi telah membantu perkembangan komunikasi menjadi dua arah yaitu komunikasi pemerintah kepada masyarakat demikian pula sebaliknya yang mampu mengubah orientasi kerja pemerintah kepada pengelolaan informasi dan strategi komunikasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dana keuangan publik khususnya dana BOS diyakini mampu meningkatkan kualitas laporan penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS (Amrullah, 2019).

Bhawa et al., (2014) meneliti tentang pengelolaan dana BOS untuk sekolah dasar dan menguji efektivitas pengelolaan dana BOS tingkat sekolah dasar di Kecamatan Sukadana. Mereka juga melakukan penelitian tentang kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam mengelola dana BOS berikut upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk menyelesaikan kendala tersebut. Hasil riset menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS untuk tingkat sekolah dasar di Kecamatan Sukadana telah merujuk pada peraturan Menteri yang mengatur dan pengklasifikasian tingkat pengelolaan pada level sangat efektif. Hasil riset mereka juga menunjukkan kendala pengelolaan dana BOS yang dihadapi adalah tentang keterlambatan penerimaan dana BOS ke pihak sekolah. Untuk menyelesaikan kendala tersebut opsi yang dijalankan oleh pihak manajemen sekolah adalah melakukan pinjaman dan membayar kegiatan sekolah setelah dana BOS diterima oleh pihak manajemen sekolah. Perubahan peraturan atau pedoman yang mengatur tentang pengelolaan dana BOS juga dapat menjadi kendala bagi pihak manajemen sekolah (Saisarani & Sinarwati, 2016). Untuk menyelesaikan kendala tersebut, pihak manajemen sekolah menyusun ulang

laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS sesuai dengan peraturan yang terkini.

Sementara permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS di Kota Malang meliputi kebutuhan operasional sekolah yang belum dapat diselesaikan dengan dana BOS, keterlambatan pihak sekolah untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, kompetensi guru yang diberikan kesempatan sebagai bendahara sekolah dan persepsi yang keliru di masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya (Regina et al., 2014a).

Teknologi dan sistem informasi dapat membantu meningkatkan kualitas laporan realisasi BOS (Uviyanti & Pramuka, 2020a). Laporan realisasi BOS yang berkualitas diharapkan dapat menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan dana BOS. (Albar et al., 2017) menyatakan bahwa aplikasi sistem informasi dapat dibangun untuk memberikan informasi kepada pimpinan sekolah dan bendahara mengenai permasalahan penyaluran dana BOS dengan harapan bahwa informasi dapat disajikan secara tepat waktu dan periodik yang mudah dalam penggunaan dan informasi yang dihasilkan mudah dipahami.

Akuntabilitas pengelolaan dana BOS terbagi dalam dua kategori yaitu akuntabilitas internal dan eksternal (Sulfiati et al., 2019). Akuntabilitas internal berkaitan dengan pelaporan penggunaan dana BOS secara berjenjang dari sekolah kepada Dinas Pendidikan dan diteruskan kepada Kementerian Pendidikan. Akuntabilitas eksternal berkaitan dengan pelaporan penggunaan dana BOS kepada pemeriksa baik kepada Inspektorat sebagai pemeriksa internal maupun kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemeriksa eksternal pengelolaan keuangan BOS. Kegiatan operasional sekolah dapat terganggu akibat keterlambatan penyaluran dana BOS kepada sekolah dan kondisi infrastruktur dan kemampuan teknologi informasi dapat mengganggu akuntabilitas dalam bentuk keterlambatan penyampaian laporan penggunaan dana BOS (Sulfiati et al., 2019).

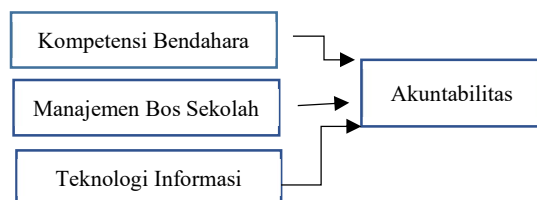
Kepala sekolah, bendahara sekolah dan perwakilan guru sebagai tim manajemen sekolah memiliki peran yang sangat penting dan menentukan untuk mendukung efektivitas perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS (Andi et al., 2015). Strategi penggunaan dana BOS yang telah direncanakan dan diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan diharapkan dapat meningkatkan dampak positif terhadap peningkatan transparansi pengelolaan dana BOS. Dengan menggunakan prinsip tata kelola yang baik, disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan

independensi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku etis manajemen sekolah sebagai pengelola dana BOS (Fauzan, 2014).

Konsep akuntabilitas dalam administrasi publik menekankan adanya pertanggungjawaban secara terbuka kepada pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan atau pihak yang berkepentingan secara langsung (Arismunandar et al., 2013). Lebih lanjut diuraikan bahwa akuntabilitas mewajibkan pemerintah atau aparat yang bekerja di dalamnya untuk mengambil tindakan atau melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Untuk sektor pendidikan, konsep akuntabilitas dilakukan melalui dua tahap utama yaitu proses pembuatan dan sosialisasi kebijakan. Pada tahap pengambilan keputusan maka indikator akuntabilitas dapat tercermin dari tertulisnya keputusan yang diambil dan ketersediaan bagi masyarakat yang membutuhkan, kejelasan dan sasaran kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai dan etika, mekanisme pengambilan kebijakan dan konsistensi pencapaian target operasional yang telah ditetapkan. Pada tahap sosialisasi maka indikator akuntabilitas dapat diindikasikan dari penyebaran informasi secara lengkap dan akurat atas kebijakan yang telah diambil, ketersediaan sistem informasi dan akses publik atas setiap keputusan atau kebijakan yang telah diambil.

Kerangka Konsep Penelitian

Penelitian dengan topik pengelolaan dana BOS ditujukan untuk mengukur tingkat akuntabilitas sebagai variabel dependen dengan parameter kompetensi bendahara, fungsi manajemen sekolah dan teknologi informasi sebagai variabel independen. Pengujian variabel independen kompetensi, fungsi manajemen sekolah dan teknologi dilakukan secara parsial terhadap akuntabilitas. Kemudian semua variabel independen tersebut diuji secara simultan terhadap variabel akuntabilitas sebagai variabel dependen. Kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut :



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, landasan teori dan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, hipotesis penelitian yang dapat dibangun adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh kompetensi bendahara terhadap akuntabilitas

Sebagaimana telah diungkapkan oleh Bauder dalam Busro, (2018) bahwa unsur kompetensi meliputi pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja. Dengan kompetensi yang memuat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki maka bendahara akan menyelesaikan pekerjaannya dengan cermat. Bandiyono & Andri, (2012) menyatakan bahwa bendahara memiliki tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membelanjakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS yang bersumber dari APBN. Regina et al., (2014) menemukan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi sekolah dalam pengelolaan dana BOS adalah masih kurangnya kompetensi bendahara sekolah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS. Di sisi lain, Ariastiani et al., (2018) menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan untuk mencegah penyalahgunaan dana BOS. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi SDM yang dimiliki maka kemampuan untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan dana BOS juga semakin meningkat atau dengan kalimat lain bahwa SDM yang kompeten akan berakibat pada penyalahgunaan dana BOS semakin menurun. Hasil penelitian yang berbeda diuraikan oleh Kasmini et al., (2017) yang menyatakan bahwa Pendidikan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat efektivitas pengelolaan dana BOS. Hasil riset menunjukkan bahwa walaupun bendahara sekolah telah memiliki latar belakang pendidikan Strata 1, khususnya yang bukan sarjana akuntansi, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana

BOS. Sementara Kahar et al., (2018) menyimpulkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Semakin baik kompetensi pengelola dana BOS daerah maka semakin handal laporan keuangan pengelolaan dana BOS. Hasil riset tentang pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pelaporan dana BOS yang berbeda namun simpulan yang berpengaruh positif dan signifikan lebih mendominasi, maka hipotetis yang dibangun adalah :

H1 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan dana BOS

2. Pengaruh Tim BOS sekolah terhadap akuntabilitas

Teori stewardship berkeyakinan bahwa para agen akan berusaha untuk menyelaraskan kepentingan bersama dengan para prinsipal (Pasoloran & Rahman, 2001). Ketika terjadi perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen, maka agen akan berusaha untuk menyesuaikan dengan kepentingan prinsipal. Sementara teori pemangku kepentingan berkeyakinan bahwa setiap keputusan yang diambil telah mempertimbangkan kepentingan para pemangku (Donleavy, 2016).

Sistem manajemen Pendidikan berbasis sekolah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan warga sekolah. Dengan pendekatan manajemen berbasis sekolah maka setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang meliputi bidang keuangan, kurikulum, sarana dan prasarana, kepentingan sekolah lainnya meminta partisipasi aktif dan kontribusi dari para pemangku kepentingan (Firdianti, 2018).

Hasil riset yang dilakukan oleh Susanti, (2019) menemukan bahwa partisipasi aktif warga sekolah dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Yusra et al., (2021) menyimpulkan bahwa partisipasi para pemangku kepentingan

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Keterlibatan pimpinan sekolah, guru dan komite sekolah memberikan dampak positif terhadap keefektifan perencanaan dan penggunaan dana BOS (Andi et al., 2015). Hasil riset yang berbeda dikemukakan oleh Rakhmawati, (2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi partisipasi maka akan semakin banyak pihak yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Semakin banyak pertimbangan yang perlu diperhatikan maka akan mengganggu efektivitas pengelolaan dana BOS. Berdasarkan hasil temuan riset yang masih terjadi perbedaan tersebut, hipotetis yang akan dibangun adalah:

H2 : Partisipasi Tim Manajemen BOS Sekolah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana BOS

3. Pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas

Karim et al., (2020) menyatakan bahwa teknologi informasi diciptakan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pekerjaan, membantu memecahkan masalah, membuka kreativitas dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu perkembangan komunikasi menjadi dua arah yaitu komunikasi pemerintah kepada masyarakat demikian pula sebaliknya yang mampu mengubah orientasi kerja pemerintah kepada pengelolaan informasi dan strategi komunikasi.

Albar et al., (2017) menyatakan bahwa aplikasi sistem informasi dapat dibangun untuk memberikan informasi kepada pimpinan sekolah dan bendahara mengenai permasalahan penyaluran dana BOS dengan harapan bahwa informasi dapat disajikan secara tepat waktu dan periodik yang mudah dalam penggunaan dan informasi yang dihasilkan mudah dipahami. Teknologi dan sistem informasi dapat membantu meningkatkan kualitas laporan realisasi BOS (Uviyanti & Pramuka, 2020a). Laporan realisasi BOS

yang berkualitas diharapkan dapat menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan dana BOS. Namun penggunaan teknologi informasi oleh para kepala sekolah maupun bendahara BOS untuk membantu penyelesaian permasalahan penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS masih sulit dilakukan karena keterbatasan kemampuan kepala sekolah dan bendahara BOS dalam pengoperasian komputer (Ariyanto, 2019). Kahar et al., (2018) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, maka hipotesis yang dibangun adalah :

H3 : Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana BOS

4. Pengaruh kompetensi bendahara, manajemen BOS sekolah dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas
Sebagaimana pembahasan sebelumnya yang telah disimpulkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS (Kahar et al., 2018a). Semakin baik kompetensi pengelola dana BOS daerah maka semakin handal laporan keuangan pengelolaan dana BOS. Hasil riset tentang pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pelaporan dana BOS yang berbeda namun simpulan yang berpengaruh positif dan signifikan lebih mendominasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa Susanti, (2019) menemukan bahwa partisipasi aktif warga sekolah dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Yusra et al., (2021) menyimpulkan bahwa partisipasi para pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Sementara Teknologi dan sistem informasi dapat membantu meningkatkan kualitas laporan

realisasi BOS (Uviyanti & Pramuka, 2020a). Laporan realisasi BOS yang berkualitas diharapkan dapat menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan dana BOS. Berdasarkan hasil riset yang telah diuraikan secara parsial tersebut, dibangun hipotesis bahwa :

H4 : Kompetensi, Tim Manajemen BOS Sekolah dan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas dana BOS

3. METODOLOGI PENELITIAN

Sumber dan Jenis Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil kuesioner yang dikirimkan kepada para pengelola dana BOS di sekolah negeri dan swasta baik tingkat SD dan SMP di kota Tangerang Selatan. Merujuk pada data pokok pendidikan, jumlah sekolah SD dan SMP di kota Tangerang Selatan adalah 542 sekolah dan sebanyak 109 sekolah telah memberikan respons atas survei yang diajukan. Untuk kebutuhan literatur, selain dari buku-buku, jurnal, dan media lainnya, peneliti juga memperoleh data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik pengisian kuesioner untuk pengumpulan data dengan tujuan mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas data. Daftar pertanyaan diajukan kepada para sumber data (responden) dalam kuesioner untuk dijawab sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan terstruktur dengan menyediakan alternatif jawaban sehingga responden dapat memilih sesuai dengan keadaan, sikap, opini, aspirasi atau sikap pribadinya (Nugroho et al., 2013). Gambaran umum tentang populasi yang sedang diteliti dapat diperoleh dengan menggunakan metode kuantitatif. Pendalaman hubungan antar variabel dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan merupakan fokus materi penelitian kuantitatif. Fokus penelitian kuantitatif terletak pada pengujian korelasional dan menjelaskan

hubungan antar variabel walaupun uraiannya dapat bersifat narasi atau deskriptif.

Pengolahan Data

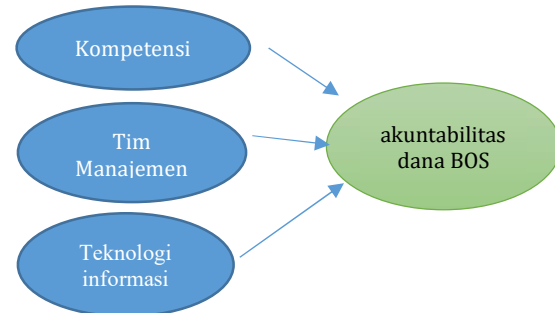
Hair Jr et al., (2017) merekomendasikan penggunaan PLS SEM saat peneliti akan melakukan analisis yang berkaitan dengan pengujian kerangka teoritis dari sebuah perspektif yang bersifat prediksi, model memiliki struktur yang kompleks dan melampirkan konstruk yang banyak, indikator dan hubungan antar model. Tujuan penelitian adalah riset eksplanatory untuk pengembangan teori, model jalur yang mencantumkan satu atau lebih konstruk yang terukur secara formatif, riset yang berhubungan dengan data bersifat rasio, riset yang menggunakan data sekunder yang minim akan teori dasar yang bersifat komprehensif, jumlah populasi yang terbatas sehingga ukuran sampel menjadi sedikit walaupun dapat juga dipergunakan untuk ukuran sampel dalam jumlah yang besar, riset yang mengangkat isu distribusi data yang kurang proporsional, dan riset yang membutuhkan skor laten variabel yang perlu ditindaklanjuti. Dalam melakukan penelitian menggunakan PLS-SEM setidaknya perlu melalui lima tahapan terlebih dahulu. Lima tahapan tersebut antara lain adalah:

1. Konseptualisasi Model
2. Penentuan Metode Analisis Algorithm
3. Penentuan Metode Resampling

Metode resampling yang umum digunakan oleh peneliti yang menggunakan SEM terdiri dua jenis. Metode tersebut yakni *bootstrapping* dan *jackknifing*. Pada penelitian ini metode resampling yang akan digunakan adalah metode *bootstrapping*. Metode *jackknifing* tidak bekerja sebaik *bootstrapping*.

4. Menggambar Diagram Jalur

Sebelum menggambar diagram jalur, diperlukan konseptualisasi model yang merupakan langkah pertama dalam penelitian menggunakan PLS-SEM. Konseptualisasi model dirancang sesuai dengan model yang akan diestimasi. Pada penelitian ini, gambar diagram jalur adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Jalur

Sumber : Diolah penulis (2021)

5. Evaluasi Model

Pada PLS-SEM, model evaluasi yang dilakukan adalah dengan menilai outer model dan inner model. Evaluasi model pengukuran atau disebut penilaian *outer* model digunakan untuk menilai reliabilitas dan validitas model. Kemudian evaluasi model struktural atau *inner* model digunakan untuk menilai hubungan antar variabel. Adapun bentuk pengukuran/evaluasi dari *inner* dan *outer* model dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Pengukuran Outer Model dan Inner Model

Jenis Penilaian	Keterangan	Kriteria
Outer Model	Convergent Validity	Nilai <i>Average Variance Extracted</i> (AVE) >0,50 dan Nilai <i>loading factor</i> >0,70
	Discriminant Validity	nilai <i>Cross loading</i> harus >0,70 dan korelasi konstruk dengan item pengukuran harus lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya.
	Composite Reliability	Nilai batas yang diterima untuk tingkat

		reliabilitas komposit (pc) adalah > 0,7
Inner Model	R Square Kuat	0,75
	R Square Moderat	0,50
	R Square Lemah	0,25

Sumber : Diolah penulis Data Tahun 2021
Teknis Analisis Data

Setelah semua data yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap, Langkah berikutnya adalah melakukan analisis data (Muhson, 2006) Pada Langkah awal uji hipotesis, prosedur statistik deskriptif dilakukan dari data yang telah diperoleh sebelumnya. Menurut Muhson, (2006) analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul namun tidak dilakukan penarikan kesimpulan atau generalisasi.

Teknik statistik deskriptif yang digunakan diantaranya adalah penyajian melalui tabel, perhitungan median, persentase data, dan *mean*. Statistik deskriptif digunakan pada seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran secara umum atas fakta atau data yang akan diuji. Setelah mendapatkan gambaran umum tentang data yang akan diuji, selanjutnya tim peneliti akan melakukan evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan evaluasi model struktural (*inner model*). Evaluasi model pengukuran dilakukan dengan *assesment* pada *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, dan *Composite Reliability*. Evaluasi model struktural dilakukan dengan *assesment* pada *R Square*.

Setelah melakukan evaluasi pada model pengukuran dan struktural, penelitian dapat dilanjutkan pada pengujian hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini merupakan hipotesis yang telah diberi arah (*one tail*). Wong, (2019) mengatakan bahwa hipotesis yang telah diberi arah (*one tail*) dinilai signifikan apabila nilai t-statistiknya menunjukkan nilai lebih besar dari 1,64. Kemudian untuk menguji hipotesis VI dan VII akan dilakukan pengujian *Specific Indirect Effect* dan *Direct Effect*. Berdasarkan hasil

pengujian hipotesis tersebut, tim peneliti dapat memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

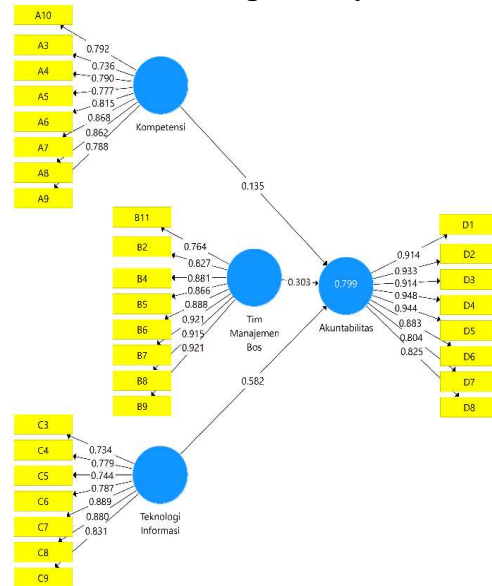
Pembahasan

Seperti yang disebutkan sebelumnya, pada langkah awal uji hipotesis, prosedur statistik deskriptif dilakukan dari data yang telah diperoleh sebelumnya. Menurut Sugiyono, analisis statistik deskriptif merupakan prosedur yang digunakan untuk melakukan uji hipotesis. Berikut analisis statistik deskriptif yang ada pada penelitian ini (Sugiyono, 2015) **Tabel 2. Analisis Deskriptif**

Kelompok	Keterangan	Jumlah	Jenis
kelamin	Laki-laki	53	Perempuan
Usia	20 - 30 Thn	25	30 - 40 Thn
	40 - 50 Thn	22	di atas 50 Thn
Jabatan	Bendahara Sekolah	24	Guru/Perwakilan
	Kepala Sekolah	28	Lainnya
	Operator	36	Tenaga Administrasi/Komputer
	Lama bekerja	0 - 5 Tahun	28
	10 - 20 Tahun	33	5 - 10 Tahun
	29	lebih dari 20 Tahun	19
Domisili	sekolah	Ciputat	31
	Ciputat Timur	15	Pamulang
	11 Pondok Aren	22	Serpong
	25 Serpong Utara	3	Setu
	2 Sumber		

Sumber : Diolah penulis Data Tahun 2021

1.1 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)



Gambar 2. Model Penelitian

Sumber: Diolah dari SMART-PLS Data Tahun 2021

Langkah selanjutnya sebelum melakukan uji hipotesis adalah melakukan evaluasi model. Evaluasi model dilakukan dengan menilai model pengukuran (*outer model*) serta model struktural (*inner model*) (Ghozali & Ratmono,

2013). Terdapat tiga kriteria analisis data untuk melakukan penilaian model pengukuran (*outer model*), yaitu uji validitas konvergen (*convergent validity*), uji validitas diskriminant (*discriminant validity*), serta uji reliabilitas (*reliability test*) (Hair Jr et al., 2017; Sarstedt et al., 2020) Penilaian pada *outer loadings* dan *average variance extracted* (AVE) diperlukan dalam uji *convergent validity* (Wong, 2019).

Tabel 3 Hasil Uji Outer Loadings

	Akuntabilitas	Kompetensi	Teknologi Informasi	Tim Manajemen Bos
A10		0.792		
A3		0.736		
A4		0.790		
A5		0.777		
A6		0.815		
A7		0.868		
A8		0.862		
A9		0.788		
B11				0.764
B2				0.827
B4				0.881
B5				0.866
B6				0.888
B7				0.921
B8				0.915
B9				0.921
C3			0.734	
C4			0.779	
C5			0.744	
C6			0.787	
C7			0.889	
C8			0.880	
C9			0.831	
D1	0.914			
D2	0.933			
D3	0.914			
D4	0.948			
D6	0.944			
D6	0.883			
D7	0.804			
D8	0.825			

Sumber: Diolah dari SMART-PLS Data Tahun 2021

Agar nilai *outer loadings* bernilai baik, nilainya lebih dari 0,700 (Hulland, 1999). Jika dilihat pada tabel di atas, nilai *outer loadings* bernilai di atas 0,700 sehingga telah memenuhi uji *outer loadings*. Hal ini memenuhi komponen *convergent validity*. Selanjutnya dilihat nilai *average variance extracted* (AVE). Hasil uji *average variance extracted* (AVE) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Average Variance Extracted (AVE)

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Akuntabilitas	0.965	0.967	0.970	0.805
Kompetensi	0.922	0.928	0.936	0.647
Teknologi Informasi	0.911	0.918	0.929	0.653
Tim Manajemen Bos	0.955	0.956	0.963	0.764

Sumber: Diolah dari SMART-PLS (2021)

Menurut para ahli, nilai hasil uji *average variance extracted* (AVE) lebih baik jika hasilnya lebih dari 0,500 (Bagozzi & Yi, 1988; Sarstedt et al., 2020). Jika dilihat dari tabel penelitian ini, nilai AVE seluruhnya bernilai lebih dari 0,500. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini telah memenuhi

komponen *convergent validity* dari sisi uji *average variance extracted* (AVE). Selanjutnya dilakukan uji *discriminant validity*. Uji ini dengan melihat hasil penilaian pada Fornell Lacker Criterion dan *cross loadings factor*, sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Fornell Locker Criterion

	Akuntabilitas	Kompetensi	Teknologi Informasi	Tim Manajemen Bos
Akuntabilitas	0.897			
Kompetensi	0.517	0.805		
Teknologi Informasi	0.859	0.476	0.808	
Tim Manajemen Bos	0.758	0.347	0.702	0.874

Sumber: Diolah dari SMART-PLS (2021)

Jika dilihat dari hasil tabel di atas, nilainya lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Sesuai dengan konsep (Fornell & Larcker, 1981) nilai AVE antara suatu variabel dengan variabel itu sendiri harus lebih besar daripada suatu variabel dengan variabel lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memenuhi uji *discriminant validity*. Berikut merupakan hasil *cross loadings factor* yang dijelaskan pada tabel berikut:

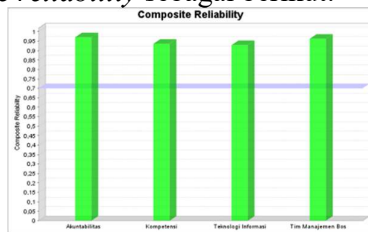
Tabel 6 Hasil Uji Cross Loadings

	Akuntabilitas	Kompetensi	Teknologi Informasi	Tim Manajemen Bos
A10	0.403	0.792	0.366	0.274
A3	0.329	0.736	0.345	0.162
A4	0.400	0.790	0.400	0.273
A5	0.477	0.777	0.441	0.335
A6	0.401	0.815	0.383	0.277
A7	0.498	0.868	0.381	0.329
A8	0.403	0.862	0.398	0.318
A9	0.377	0.788	0.335	0.221
B11	0.742	0.437	0.686	0.764
B2	0.653	0.359	0.557	0.827
B4	0.600	0.282	0.560	0.881
B5	0.655	0.303	0.595	0.866
B6	0.640	0.256	0.615	0.888
B7	0.699	0.311	0.669	0.921
B8	0.608	0.221	0.578	0.915
B9	0.662	0.221	0.613	0.921
C3	0.631	0.401	0.734	0.521
C4	0.671	0.423	0.779	0.410
C5	0.601	0.278	0.744	0.593
C6	0.620	0.315	0.787	0.563
C7	0.785	0.451	0.889	0.649
C8	0.805	0.422	0.880	0.668
C9	0.712	0.383	0.831	0.554
D1	0.914	0.485	0.796	0.688
D2	0.933	0.478	0.786	0.701
D3	0.914	0.479	0.779	0.669
D4	0.948	0.467	0.794	0.718
D5	0.944	0.475	0.813	0.735
D6	0.883	0.476	0.752	0.718
D7	0.804	0.430	0.703	0.577
D8	0.825	0.418	0.735	0.621

Sumber: Diolah dari SMART-PLS Data Tahun 2021

Menurut Kresnandra, (2016), uji *cross loadings factor* dapat dilihat dari hubungan *construct* dengan variabel pengukuran yang seharusnya melebihi ukuran *construct* lainya dan nilai *cross loadings* diatas 0,700. Jika dilihat dari hasil penelitian ini, hubungan

konstruk dengan variabel pengukuran lebih besar dari ukuran konstruk lainnya dan nilai *cross loadings* diatas 0,700. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini telah memenuhi uji *Fornell Lacker Criterion* dan *outer loadings* sebagai komponen *discriminant validity*. Selanjutnya adalah uji *reliability* yang dilihat dari hasil penilaian pada *composite reliability*. Penelitian ini menunjukkan hasil uji *composite reliability* sebagai berikut:



Gambar 3. Hasil Model Penelitian
Sumber: Diolah dari SMART-PLS Data Tahun 2021

Nilai *composite reliability* yang disarankan adalah bila nilainya lebih dari 0,700 (Bagozzi & Yi, 1988). Penelitian ini menghasilkan nilai *composite reliability* bernilai lebih dari 0,700, sehingga penelitian ini telah memenuhi uji *reliability*.

1.2 Evaluasi Uji Multikolinieritas

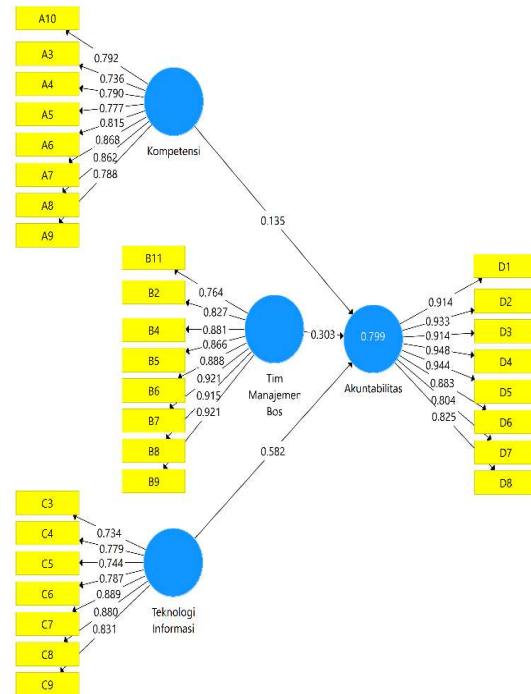
Uji *multikolinieritas* adalah pengujian mengenai ada atau tidak hubungan antar *variable independent* untuk model formatif. Uji ini dapat diketahui dengan hasil pada *variance inflation factor* (VIF), yaitu bernilai VIP 5 atau lebih yang berarti terdapat masalah dalam *multikolinieritas*, dan jika kurang menunjukkan sebaliknya (Hair et al., 2011) Pada tabel berikut menunjukkan nilai VIF di bawah 5 yang berarti tidak ada isu terkait *multikolinieritas*. Hasil uji VIF selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 7 Uji Multikolinieritas

	Akuntabilitas	Kompetensi	Teknologi Informasi	Tim Manajemen Bos
Akuntabilitas				
Kompetensi	1.000			
Teknologi Informasi	1.000			
Tim Manajemen Bos	1.000			

Sumber: Diolah dari SMART-PLS Data Tahun 2021

1.3 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)



Gambar 4 Hasil Model Penelitian
Sumber: Diolah dari SMART-PLS Data Tahun 2021

Setelah menguji model pengukuran (*outer model*), selanjutnya adalah melakukan evaluasi model struktural (*inner model*). Evaluasi *inner model* untuk mengukur kekuatan prediksi dari *inner model* dapat diketahui dengan melihat menilai R-Square untuk setiap variabel laten endogen (Ghozali & Ratmono, 2013). Hasil uji *composite reliability* dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8 Hasil Uji R-Square, Hasil Uji Normed Fit Index, dan Hasil Uji Path Coefficient

	R Square	R Square Adjusted
Akuntabilitas	0.799	0.794

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0.074	0.074
d_ULS	2.686	2.686
d_G	3.105	3.105
Chi-Square	1376.354	1376.354
NFI	0.694	0.694

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kompetensi -> Akuntabilitas	0.135	0.132	0.054	2.521	0.012
Teknologi Informasi -> Akuntabilitas	0.582	0.584	0.080	7.257	0.000
Tim Manajemen Bos -> Akuntabilitas	0.303	0.304	0.078	3.899	0.000

Sumber: Diolah dari SMART-PLS Data Tahun 2021

Dari tabel di atas, nilai R-Square untuk variabel endogen akuntabilitas adalah 0,799, sehingga dapat disimpulkan bahwa mendekati kuat (Hair et al., 2011). Ini berarti sebesar

79,9% variabel akuntabilitas dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi manajemen sekolah, fungsi manajemen sekolah, dan teknologi informasi, sedangkan variabel lain yang berada di luar model adalah sekitar 20,1%.

Hal ini berarti bahwa model struktural pada penelitian ini telah memenuhi unsur *goodness of fit* yang dapat dilihat dari nilai Q2 yang tinggi yaitu sebesar 0,794. Sedangkan pada pengujian indikator model fit dilihat dari nilai *Normed Fit Index* (NFI) atau *Bentler and Bonett Index* yang menunjukkan angka 0,561. Jika dilihat dari nilai tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian ini telah memenuhi model yang fit (Bentler & Bonett, 1980).

1.4 Hasil Uji Hipotesis

Pengujian atas signifikansi dari hipotesis dapat dilakukan dengan melihat hasil penilaian *t-statistics*. Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan uji satu arah (*one tailed*). Hipotesis dapat diterima jika nilai *t-statistics* lebih besar dari 1,64 dan nilai signifikansi (Sig) *P value* <0,05 (Wong, 2019). Jika dilihat dari hasil uji *t-statistics* pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas menghasilkan nilai 2,51 yang lebih besar dari standar yaitu 1,64 dan nilai *P value* 0,012 yang lebih rendah dari 0,05. Hasil uji ini memberikan simpulan bahwa kompetensi bendahara sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS sesuai dengan hipotesis 1. Hasil uji ini selaras dengan penelitian Ariastiani et al., (2018b); Bandiyono & Andri, (2012b); dan Kahar et al., (2018b) yang menyimpulkan bahwa kompetensi bendahara berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS dan memperkuat simpulan penelitian Regina et al., (2014b) agar bendahara meningkatkan kompetensi untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

Hasil uji *t-statistics* pengaruh peran manajemen sekolah terhadap akuntabilitas menghasilkan nilai 3,89 yang lebih besar dari standar yaitu 1,64 dan nilai *P value* 0,000 yang lebih rendah dari 0,05. Nilai ini memberikan arti bahwa kontribusi aktif manajemen sekolah dalam merencanakan, mengelola dan melaporkan penggunaan kegiatan yang bersumber dari dana BOS memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap akuntabilitas dana BOS. Simpulan ini selaras dengan hasil penelitian Susanti, (2019b) dan Yusra et al., (2021b) yang menyatakan bahwa partisipasi aktif manajemen sekolah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas dana BOS dan berbeda dengan simpulan riset Rakhmawati, (2018b) yang menyatakan bahwa partisipasi aktif pemangku kepentingan hanya memperpanjang proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana BOS.

Hasil uji *t-statistics* pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas menghasilkan nilai 7,25 yang lebih besar dari standar yaitu 1,64 nilai *P value* 0,000 yang lebih rendah dari 0,05. Nilai ini memberikan arti bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Hasil riset ini mendukung simpulan riset yang telah dilakukan oleh Kahar et al., (2018b) dan Uviyanti & Pramuka, (2020b) yang menyatakan bahwa teknologi informasi mampu meningkatkan kualitas laporan pengelolaan dana BOS. Hasil riset ini juga selaras dengan simpulan Ariyanto, (2020) agar para kepala sekolah dan bendahara sekolah familier dengan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

Uji F (secara simultan)

Untuk uji F menggunakan aplikasi SPSS, uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas (X) yang terdiri dari Teknologi Informasi (X1), Kompetensi (X2), dan Tim Manajemen BOS (X3) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) dalam menjelaskan isi informasi terhadap variabel terikat Akuntabilitas (Y). Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini :

Tabel 9 Hasil Uji F Data Tahun 2021

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regre sion	18.955	3	6.318	113.58 2	.000 ^b

Residual	5.841	105	.056	
Total	24.796	108		

- a. Dependent Variable: Akuntabilitas
b. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Kompetensi, Tim Manajemen BOS
Sumber: Diolah dari SPSS (2021)

Dengan derajat kepercayaan sebesar 95%, $F_{hitung} (113,582) > F_{tabel}$ maka secara simultan variabel bebas X yang terdiri dari Teknologi Informasi (X1), Kompetensi (X2), dan Tim Manajemen BOS (X3) mempunyai pengaruh terhadap Akuntabilitas (Y). Agar pengelolaan dana BOS dapat dilakukan secara akuntabel maka Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan perlu memperhatikan kompetensi para pengelola dana BOS khususnya bendahara pengeluaran, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi dan mengajak peran aktif para pemangku kepentingan mulai dari manajemen sekolah, komite sekolah dan masyarakat sekitar sekolah dalam pengelolaan dana BOS.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana BOS dari aspek kompetensi, fungsi manajemen sekolah dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil riset menunjukkan bahwa kompetensi, fungsi manajemen sekolah dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Hasil riset ini juga menyimpulkan bahwa secara simultan kompetensi, fungsi manajemen sekolah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

Hasil riset ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan kualitas kompetensi bagi bendahara yang telah memiliki latar belakang Pendidikan yang memadai tetapi belum memperoleh pelatihan tentang pengelolaan, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat pengelolaan data dan mempermudah akses masyarakat terhadap dana BOS. Lebih lanjut diketahui bahwa partisipasi para pemangku kepentingan seperti tim manajemen sekolah, komite sekolah dan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan untuk membentuk akuntabilitas pengelolaan dana BOS di Kota Tangerang Selatan.

Penelitian ini memberi ruang bagi para akademisi lainnya untuk menggali variabel lain yang tidak diketahui oleh tim peneliti untuk menguji akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Penelitian ini juga memberi kesempatan kepada pihak lain yang tertarik untuk mendalami generalisasi variabel yang telah diuji kepada objek sekolah secara lebih mendetail dengan pendekatan atau metode kualitatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan dukungan teknis melalui surat dengan nomor 421.4/5819-Sekret tanggal 15 Oktober 2021 yang mendorong kepada para pimpinan sekolah negeri dan swasta baik tingkat SD maupun SMP untuk mengisi survei tentang pengukuran akuntabilitas dana BOS di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Tim peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada 109 responden yang mewakili sekolah baik tingkat SD maupun SMP untuk mengisi dan menyelesaikan kuesioner sesuai dengan keadaan sekolah yang sesungguhnya. Tidak lupa tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah membantu baik secara administrasi dan teknis sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, F. M., Perguruan, M., & Raharja, T. (2017). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENYALUR DANA BANTUAN SISWA (BOS) BERBASIS WEB. *Jurnal CERITA*, 3(2), 228–244.
- Amrullah, I. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DENGAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris BOS SMA / SMK Kota Cilegon) Ihsan Amrullah Keywords : Quality of human resources , utilization of information technology , internal control and quality. *JRA Tirtayas*, 04(01), 18–34.
- Andi, M., AR, M., & Usman, N. (2015). Swasta Di Kabupaten Pidie. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 3(4), 53–63.

- Ariastiani, N. K. D., Yuniarta, G. A., & Kurniawan, P. S. (2018a). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Proactive Fraud Audit, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana BOS se-Kabupaten Klungkung. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 8(2), 13–69.
- Ariastiani, N. K. D., Yuniarta, G. A., & Kurniawan, P. S. (2018b). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Proactive Fraud Audit, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana BOS se-Kabupaten Klungkung. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 8(2), 13–69.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/13291>
- Arismunandar, Nurhikmah, & Achmad, W. K. (2013). Manajemen Berbasis Sekolah. In *Studia Islamika* (Vol. 10, Issue 23).
- Ariyanto, S. (2019). Dampak Penerapan Teknologi Informasi eKSKUL dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi*, 1–9.
- Ariyanto, S. (2020). DAMPAK PENERAPAN SISTEM INFORMAS DAMPAK PENERAPAN SISTEM INFORMASI e-KSKUL DALAM PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA BOS DI KABUPATEN WONOGIRI: DAMPAK PENERAPAN SISTEM INFORMASI e-KSKUL DALAM PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA BOS DI KABUPATEN WONOGIRI. *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi)*, 9(01), 147–156.
- Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the Evaluation of Structural Equation Models. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 16(1), 74–94.
<https://doi.org/10.1007/BF02723327>
- Bandiyono, A., & Andri, S. (2012a). EVALUASI PROGRAM PELATIHAN BENDAHARA PENGELUARAN KEMENTERIAN KEUANGAN. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 1(1), 1–10.
- Bandiyono, A., & Andri, S. (2012b). EVALUASI PROGRAM PELATIHAN BENDAHARA PENGELUARAN KEMENTERIAN KEUANGAN. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 1(1), 1–10.
- Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. *Psychological Bulletin*, 88(3), 588.
- Bhawa, G. A. S., Haris, I. A., & Artana, M. (2014). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada Gede Andreyan Semara Bhawal, Iyus Akhmad Haris2, Made Artana3. *Pendidikan Ekonomi*, 4(1).
- Busro, M. (2018). *Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (1st ed.). Prenadamedia Grup.
- Davis, J. H., David, S. F., & Donaldson, L. (1997). Toward A Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/259223>
- Dinas Pendidikan. (2021). *RENSTRA DINAS PENDIDIKAN TANGSEL*.
- Donleavy, G. (2016). *An Introduction to Accounting Theory* (N. Ibbet, Ed.; 1st ed.). bookboon.com.
- Fauzan, F. (2014). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, 10(3), 158.
<https://doi.org/10.21067/jem.v10i3.776>
- FAUZAN, S. (2020). Pengaruh Kualitas Penganggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Sekolah. *Soedirman Economics Education Journal*, 2(2), 1.
<https://doi.org/10.32424/seej.v2i2.3100>
- Firdianti, A. (2018). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah* (E. W. Astuti, Ed.; 1st ed.). Gre Publishing.

- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50.
- Freeman, R. E. E., & McVea, J. (2005). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *SSRN Electronic Journal, March* 2018. <https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). Analisis multivariat dan ekonometrika: Teori, konsep, dan aplikasi dengan EVIEWS 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 139–152.
- Hair Jr, J. F., M.Hult, G. T., M.Ringle, C., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*.
- Hakim, D. R., & Suhendar, D. (2020). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menengah Kejuruan (Studi Komparatif pada SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Banten). *Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 17(1), 11–23. <https://doi.org/10.25134/equi.v17i01.A>
BSTRACT
- Hidayat, D., & Novianti, W. (2019). *Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Kejuruan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah Di Smk Negeri Se-Kota Tangerang Selatan*. 4, 80–99.
- Hulland, J. (1999). Use of Partial Least Squares (PLS) in Strategic Management Research: A Review of Four Recent. *Strategic Management Journal*, 20(2), 195–204.
- Ismail, F. (2018). Manajemen Berbasis Sekolah Solusi Meningkatkan Kualitas Sekolah. *Jurnal Ilmiah Iqro*.
- Julantika, T., Kurrohman, T., & Supatmoko, D. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i1.4564>
- Kahar, A., Ridwan, & Sakriaty. (2018a). OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (Survey Pada Sekolah Pengelola Dana BOSDA di Kabupaten Buol). *Katalogis*, 6(2), 30–40.
- Kahar, A., Ridwan, & Sakriaty. (2018b). OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (Survey Pada Sekolah Pengelola Dana BOSDA di Kabupaten Buol). *Katalogis*, 6(2), 30–40.
- Karim, A., Bangun, B., Kusmanto, Purnama, I., Harahap, S. Z., & Irmayani, D. (2020). *Pengantar Teknologi Informasi* (T. Y. L. B. Gemilang, Ed.; 1st ed.). Yayasan Labuhanbatu Berbagai Gemilang.
- Kasmini, N. W. A., Wirama, D. G., & Wirakusuma, M. G. (2017). Pengaruh Pendidikan, Kompetensi, Motivasi dan Komitmen Organisasi pada Kinerja Bendahara Sekolah Menengah di Kabupaten Gianyar. *E Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1, 109–136.
- Kharisma, B. (2013). Dampak Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Tingkat Putus Sekolah di Indonesia : Analisis DID The Impact Of The School Operational Assistance (BOS) Program On The Dropout Rate In Indonesia : A DID Analysis. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6(Februari), 7–15.
- Kresnandra, A. A. N. A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(2).
- Muhson, A. (2006). Teknik analisis kuantitatif. *Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta*.
- Nugroho, R. W., Widowati, N., & Rihandoyo, R. (2013). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri Semarang Selatan Tahun 2011). *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(1), 171–178.

- Parulian, H., & Thoha, N. (2008). *Kompetensi Plus*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pasoloran, O., & Rahman, F. A. (2001). Teori Stewardship : Tinjauan Konsep dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Sektor Publik. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, *V*(2), 418–432.
- Pontoh, J., Ilat, V., & Manossoh, H. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi*, *1*, 223–232.
- Pratiwi, S. N. (2016). Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Kualiti Sekolah. *Jurnal EduTech*, *2*(1), 86–96.
- Rahayu, A., & Setianingsih, E. L. (2005). *Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Oleh : Anisa Rahayu , Endang Larasati Setianingsih Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dip.*
- Rahayu, K. P., Wati, R., Prihanto, Y., Wartono, T., & Nuryani, Y. (2020). Pelatihan Audit Internal Penggunaan Dana Bos Untuk Kepala Sekolah, Bendahara, Administrasi Smp Kota Tangerang Selatan Gugus 03. *Dedikasi Pkm*, *1*(2), 6. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v1i2.6382>
- Rahmadhani, L., & Suparno, S. (2020). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DAN PERAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SMP NEGERI DI BANDA ACEH*. *5*(3), 400–411.
- Rakhmawati, I. (2018a). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, *1*(1), 95. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.4078>
- Rakhmawati, I. (2018b). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, *1*(1), 95. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.4078>
- Regina, B., Soeaidy, S., & Ribawanto, H. (2014a). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, *3*(1), 61–66.
- Regina, B., Soeaidy, S., & Ribawanto, H. (2014b). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, *3*(1), 61–66.
- Rokhlinasari, S. (2016). Teori Teori dalam Pengungkapan Informasi CSR. *Al - Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
- Saisarani, K. G. P., & Sinarwati, N. K. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri Jumapolo. *Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*, *11*(2), 340–348.
- Saleh, M. H. (2005). Kebijakan Pemerintah SBY-JK tentang kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005. *Sosial-Politika*, *6*(12), 43–58.
- Samdiar, A. R., Fitriana, D., Goeirmanto, L., Informatika, J. T., Komputer, F. I., Buana, U. M., Raya, J., & Selatan, M. (2010). Aplikasi Penyebaran Dana BOS Berbasis Peta di Wilayah Tangerang Selatan. *Seminar Nasional Pengaplikasian Telematika*, 449–453.
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2020). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8>
- Simarmata, J., Chaerul, M., Mukti, R. C., & Purba, D. W. (2020). *Teknologi Informasi : Aplikasi dan Penerapannya*

- (T. Limbong, Ed.; 1 st). Yayasan Kita Menulis.
- Soemari, Y. B., Sapri, Maghfiroh, F., Yuniarti, Achaditani, N. M., Variyani, R., Tsabitah, A. F., Zulkarnain, A. K., Wahyuningsih, M. S. H., Nugrahaningsih, D. A. A., Akmaliyah, M., Syamsul, E. S., Amanda, N. A., Lestari, D., 2021, scmidt iotc, Sumule, A., Kuncahyo, I., Leviana, F., Xue-, W., Kimia, J. T., ... Jubaidah, S. (2020). PELATIHAN PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN DANA BOS DENGAN OBJEK KEPALA SEKOLAH, BENDAHARA DAN ADMINISTRASI SMP KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Dharma Laksana*, 2(1), 5–7.
- Soulisa, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Negeri Di Kecamatan Palu Timur. *Katalogis*, 5(1), 91–98.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 130.
- Suhardi, D. (2020). *Sejarah dan Peran BOS Bagi Pendidikan Indonesia*. Jendela Pendidikan Dan Kebudayaan. <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/berita/detail/sejarah-dan-peran-bos-bagi-pendidikan-indonesia>
- Sulfiati, Alam, A. S., & Irwan, A. L. . (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Meraja Journal*, 2(41), 185–201.
- Susanti, H. (2019a). Penerapan Good School Governance dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD Kota Blitar. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 8, 74–84.
- Susanti, H. (2019b). Penerapan Good School Governance dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD Kota Blitar. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 8, 74–84.
- Uviyanti, S., & Pramuka, B. A. (2020a). *Terhadap Kualitas Laporan Bantuan Operasional Sekolah*. 5(7), 471–480.
- Uviyanti, S., & Pramuka, B. A. (2020b). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Bantuan Operasional Sekolah*. 5(7), 471–480.
- Widyastuti, A., Simarmata, J., Meirista, E., Susanti, S. S., & Dwiyanto, H. (2020). *Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi dan Perencanaan* (T. Limbong, Ed.; 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Wirawan, M. (2014). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Pada Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(1), 12–15.
- Wong, K. K.-K. (2019). *Mastering Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS in 38 Hours*. iUniverse.
- Yanti, N. L. T. (2021). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS Di SMP N 3 Sukawati Dalam Program RKAS. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 139–151.
- Yusra, M., Yunita, N. A., Nurhasanah, & Arliansyah. (2021a). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Jambo Aye , Aceh Utara : Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. *Visioner Dan Strategis*, 10, 79–86.
- Yusra, M., Yunita, N. A., Nurhasanah, & Arliansyah. (2021b). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Jambo Aye , Aceh Utara : Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. *Visioner Dan Strategis*, 10, 79–86.

